

Bangun Faskes Perawatan Lansia Berbasis Ekologi, BKNI RI Utamakan Serap Tenaga Kerja Lokal



<https://redkal.com/bangun-faskes-perawatan-lansia-berbasis-ekologi-bkni-ri-utamakan-serap-tenaga-kerja-lokal/>

KabarKalimantan, Banjarmasin – Langkah nyata diambil BKNI RI dalam membantu pemerintah menangani masalah pengangguran diwujudkan dengan perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan dan perawatan lansia berbasis ekologi.

Pasalanya, dalam program tersebut BKNI RI jelas membutuhkan tenaga kerja, baik tenaga medis dan pekerja lainnya untuk menjalankannya.

Di Kalimantan Selatan misalnya, pada 2020 ini BKNI RI sudah melakukan tahapan pembebasan lahan untuk membangun faskes tersebut. Beberapa kabupaten telah ditunjuk untuk dijadikan wadah pembangunannya.

Sesuai rencana, yakni berbasis ekologi, maka pembangunan faskes tersebut direncanakan pada 12 lokasi, yang kesemuanya dinilai wilayah tertinggal.

Ada beberapa kabupaten di Kalsel yang menjadi wadah pembangunan faskes tersebut, yakni Kabupaten Banjar meliputi Desa Kiram dan Belimbing. Kabupaten Tanah Laut meliputi Desa Sabuhur dan Bentok Darat.

Sementara di Hulu Sungai Tengah meliputi Desa Atiran dan Kindingan. Untuk Kabupaten HSS di Desa Hamak. Kabupaten Kotabaru di Desa Sungai Pasir dan Semaras.

Selain Kalsel, ada juga di provinsi tetangga, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara di Desa Loleng. Kabupaten Paser di Desa Rantau Panjang, dan Kabupaten Kotawaringin Barat di Desa Kubu.

“Tahun lalu kami baru melaunching program ini. Nah, di tahun ini kami fokus pada pembebasan lahan bekerjasama dengan BPN masing-masing wilayah untuk memastikan tak adanya tumpang tindih lahan yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian, di tahun 2021 mendatang kami targetkan sudah ada terbangun bangunan fisik faskes tersebut,” ujar Presidium BKNI RI RM Tri Harsono saat launching penandatanganan kontrak dan pembebasan lahan pembangunan faskes dan perawatan lanjut usia berbasis ekologi di Hotel Rattan In Banjarmasin, Selasa (1/12/2020).

Sementara dalam proses pembangunannya, lanjut Tri Harsono, pihaknya melakukan kerjasama dengan menunjuk mitra-mitra kontraktor di wilayah masing-masing. Ia beralasan, tidak menunjuk mitra-mitra di tingkat pusat yang punya modal banyak karena untuk membantu pemerintah atau mitra-mitra daerah agar terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk menjaga suatu kawasan untuk melestraikan perekonomian daerah.

“Untuk pengawasan pelaksanaan pembangunan faskes ini dilakukan secara nasional dan internasional. Yang mendapatkan mitra pelaksana, tentu akan mendapat pendampingan pembangunan dari tingkat pusat untuk menjaga profesionalannya. Supaya mereka dapat memberikan pelaporannya dengan baik,” tandasnya.

Sedangkan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan faskes ini, lanjut Tri Harsono, bersumber dari hibah dalam dan luar negeri. Makanya, diutamakan adalah lansia dari luar negeri yang perawatannya dibiayai pemerintahnya.

“Kami mencoba menjalankan program yang bertujuan untuk meringankan beban negara dari berbagai lintas sektoral,” ucapnya.

Ia pun berharap, program yang digagasnya ini dapat berjalan lancar. Makanya, ia sangat berharap dukungan dan kerjasama dari pemerintah setempat, terutama dalam hal kemudahan pengurusan perizinan pembangunan, serta keamanan bagi para penghuni faskes tersebut nantinya.

“Saya berharap pemerintah daerah bisa mendukung program ini. Sebab program ini akan berdampak positif bagi wilayah itu sendiri, seperti akan majunya sistem perekonomian, majunya sektor pariwisata setempat karena akan diketahui secara luas,” katanya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/bangun-faskes-perawatan-lansia-berbasis-ekologi-bkni-ri-utamakan-serap-tenaga-kerja-lokal/>)

(Diringkas dari <https://theindonews.com/penandatanganan-kontrak-fasilitas-kesehatan-dan-perawatan-lanjut-usia-berbasis-wisata-ekologi-bkni-ri/>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *Bangun Faskes Perawatan Lansia Berbasis Ekologi, BKNI RI Utamakan Serap Tenaga Kerja Lokal*, 20 Desember 2020.
2. <https://theindonews.com>, *Penandatanganan Kontrak Fasilitas Kesehatan dan Perawatan Lanjut Usia berbasis Wisata Ekologi – BKNI -RI* , 5 Desember 2020.

Catatan:

- ✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi

berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan,

teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.